

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kemiskinan merupakan salah satu penyakit ekonomi makro yang dihadapi oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia (Budhi, 2013). Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian dengan cara mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan, seperti masalah pengangguran dan kemiskinan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu aspek penting untuk melihat kinerja pembangunan adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan pekerjaan dapat menyerap angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi barang atau jasa yang dihasilkan juga meningkat, sehingga diperlukan tenaga kerja semakin banyak untuk memproduksi barang atau jasa tersebut (Nisbah, 2018).

Salah satu prioritas pembangunan adalah mengurangi atau menghapus kemiskinan. Kemiskinan adalah persoalan mendasar yang sering dihadapi oleh setiap negara sehingga menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai masalah tentang kesejahteraan, seperti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kondisi keterpencilan, keterasingan, ketergantungan, dan keterbatasan dalam mengakses layanan sosial. Sehingga masalah kemiskinan merupakan masalah

yang kompleks dan bersifat multidimensional. Apabila tidak dilakukan penanganan yang tepat akan berakibat pada munculnya masalah sosial lainnya (Nisbah, 2018).

Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif karena kemiskinan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tabel 1.1 menyajikan gambaran data perbandingan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dan Blora dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2009-2018.

Tabel 1.1
Jumlah Orang Miskin dan Presentase Penduduk Miskin di Eks
Karisidenan Pati Tahun 2009-2018

Tahun	Rata-rata Jumlah Orang Miskin (ribu jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2009	133,38	15,97
2010	125,56	14,66
2011	127,46	14,88
2012	117,92	13,72
2013	117,34	11,28
2014	110,08	12,35
2015	109,18	12,19
2016	107,62	11,90
2017	106,44	11,77
2018	94,06	10,23

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, BPS (diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah orang miskin di Eks Karisidenan Pati tahun 2009-2018 cenderung mengalami penurunan namun sempat mengalami peningkatan di tahun 2011, sedangkan presentase penduduk miskin cenderung mengalami penurunan meskipun penurunan disetiap tahunnya tergolong relatif kecil. Pengentasan permasalahan kemiskinan telah banyak diupayakan, salahsatunya adalah melalui perbaikan kualitas ekonomi di suatu daerah yang diukur daritingkat PDRB. Salah satu upaya efektif yang

dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan adalah dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi tahunan (Silva dan Sumarto, 2014).

Permasalahan kemiskinan berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Biasanya, penduduk yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan atau yang disebut pengangguran (Saputra, 2011). Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia khususnya di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten/Kota Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dan Blora pada masa sekarang ini semakin kompleks. Indikasi ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun yang meningkat. Sementara itu, lapangan pekerjaan yang tersedia relatif terbatas.

Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah dibidang ekonomi saja, melainkan juga dibidang sosial seperti masalah kemiskinan dan kerawanan sosial. Secara teoritis, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran. Artinya, ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kemiskinan dan pengangguran (Seran, 2017). Upaya perluasan kesempatan kerja perlu dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan (Ashcroft dan Cavanaugh, 2008).

Tabel 1.2 menyajikan gambaran data rata-rata tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten/Kota Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dan Blora dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2009-2017.

Tabel 1.2
Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Eks Karisidenan Pati tahun 2009-2017

Tahun	Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2009	6,41
2010	5,47
2011	7,81
2012	6,53
2013	6,78
2014	5,2
2015	4,35
2017	3,65

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, BPS (diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Eks Karisidenan Pati dari tahun 2009-2017 cenderung mengalami penurunan di beberapa tahun, tetapi pada tahun 2010 dan 2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 jumlah orang menganggur sebesar 6,41%, tahun 2017 pada saat jumlah orang menganggur 3,65%. Tingginya tingkat pengangguran dapat berakibat pada kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, politik, dan budaya. Selain itu pengangguran menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Masalah pengangguran secara terbuka maupun terselubung menjadi pokok permasalahan dalam pembangunan ekonomi bagi negara-negara berkembang (Djojohadikusumo, 1994).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sumber pertumbuhan ekonomi dapat terdiri dari kenaikan kualitas dan jumlah tenaga kerja, penambahan modal melalui investasi, serta adanya penyempurnaan teknologi (Pratomo, 2017). Jika semua sumber pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dipenuhi, maka

kondisiekonomi akan stabil. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap negara telah berusaha menurunkan angka kemiskinan. Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sehingga pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan tolak ukur untuk mengukur kinerja keberhasilan perekonomian suatu negara atau wilayah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berarti bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi yang baik harus menyebar secara merata termasuk ke golongan penduduk miskin agar tidak terjadi kesenjangan pendapatan.

Tabel 1.3 menyajikan gambaran data rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dan Blora dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2009-2018.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Eks Karisidenan Pati Tahun 2009-2018

Tahun	Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2009	4,62
2010	4,66
2011	4,94
2012	5,22
2013	5,30
2014	4,68
2015	5,17
2016	8,35
2017	5,10
2018	5,03

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, BPS (diolah)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Eks Karisidenan Pati pada tahun 2009-2018 bersifat fluktuatif atau tidak stabil.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil segala keputusan, sehingga masyarakat akan sulit untuk melakukan kegiatan konsumsi, investasi, dan produksi. Hal ini akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan akan menyebabkan turunnya permintaan tenaga kerja pada setiap sektor ekonomi sehingga penyerapan tenaga kerja akan semakin menurun. Hal tersebut juga akan berpengaruh ke tingkat kemiskinan yang semakin banyak.

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi kemiskinan adalah tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kemiskinan karena semakin tinggi pendidikan seseorang akan mampu mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat menambah pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, ia akan mendorong produktivitas kerja dan pengalaman akan semakin meningkat, sangat berbeda dengan seseorang yang tidak memiliki pendidikan atau putus sekolah. Pendidikan juga harus mendapatkan sorotan dari pemerintah agar masyarakat bisa mengejar sosial ekonominya dan meningkatkan SDM masyarakat tersebut. Pendidikan perlu mendapatkan sorotan dalam mengatasi kebodohan serta ketertinggalan sosial ekonominya. Dalam penelitian tingkat pendidikan akan dilihat dari rata-rata lama sekolah atau tahun sukses seseorang mengikuti pendidikan.

Tabel 1.4 menyajikan gambaran data rata-rata lamasekolahmasyarakat di Kabupaten/Kota Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dan Blora dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2009-2018.

Tabel 1.4
Rata-rata Lama Sekolah Masyarakat di Eks Karisidenan Pati Pada
Tahun 2010-2018

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
2010	6,33
2011	6,47
2012	6,59
2013	6,73
2014	6,87
2015	6,96
2016	7,02
2017	7,22
2018	7,32

Sumber: Jawa Tengah dalam Angka, BPS (diolah)

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Eks Karisidenan Pati pada tahun 2010-2018 mengalami kenaikan, di mana rata-rata lama sekolah tertinggi pada tahun 2018 sebesar 7,32 tahun dan rata-rata lama sekolah terendah pada tahun 2010 sebesar 6,33 tahun. Meskipun setiap tahunnya mengalami peningkatan namun rata-rata lama sekolah hanya 6-7 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP. Capaian rata-rata lama sekolah yang hanya sampai kelas 1 SMP tentu akan sulit untuk memasuki dunia kerja karena rata-rata lama sekolah minimal 12 tahun atau lebih.

Peningkatan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh dan diharapkan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan pekerjaan yang diperoleh masyarakat sekitar akan semakin baik. Namun jika peningkatan pendidikan tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang luas itu hanya akan

meningkatkan jumlah pengangguran yang tinggi dan berdampak pada kemiskinan yang meningkat.

1.2 Rumusan Masalah

Secara umum, permasalahan pembangunan ekonomi yang sering dialami oleh negara berkembang yaitu kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dalam distribusi pendapatan, pendidikan, dan tingginya angka pertumbuhan penduduk. Hal ini menunjukkan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan penghambat proses pembangunan ekonomi.

Pengangguran yang menurun dari tahun ke tahun di Eks Karesidenan Pati seperti yang nampak pada Tabel 1.2 memerlukan kebijakan dari pemerintah untuk menambah kesempatan kerja yang ada agar pengangguran tidak meningkat.

Pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan di setiap tahunnya seperti yang ada di Tabel 1.3, walaupun kenaikannya cenderung kecil atau rendah di setiap tahunnya. Dengan demikian perusahaan di sekitar Eks Karesidenan Pati cenderung tidak menambah tenaga kerja di setiap sektor pruksinya yang berakibat masyarakat sekitar tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka dari itu kemiskinan sulit teratasi.

Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa rata-rata lama sekolah di Eks Karesidenan Pati meningkat. Meski demikian, lamanya penduduk menempuh sekolah hanya 6-7 tahun (lulusan SD). Rendahnya kualitas sumber daya manusia berakibat pada rendahnya produktivitas yang dihasilkan sehingga berdampak pekerjaan seseorang. Semakin rendah pendidikan seseorang maka pekerjaan seseorang akan rendah atau bahkan menganggur.

Sehingga kemiskinan juga akan meningkat. Adanya pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatkan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan meningkatkan keterampilan kerja sehingga akan mendorong produktivitas kerjanya.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendidikan terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Pati. Dengan demikian pertanyaan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Pati?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Pati?
3. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Pati?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Eks Karesidenan Pati.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pati.

2. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait tingkat kemiskinan di Eks Karisidena Pati.
3. Sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan latar belakang penelitian yaitu pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pati tahun 2009-2018 sebagai obyek penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini juga menjelaskan secara singkat mengapa variabel independen berkaitan dengan variabel dependen.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka. Bab ini berisikan landasan teori yang berkaitan dengan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan. Bab ini juga menjelaskan secara singkat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pada bab ini juga dilampirkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan juga hipotesis penelitian.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Bab ini tentang variabel penelitian dari definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, serta model hasil analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian.

Bab keempat adalah hasil analisis. Bab ini berisi deskripsi objek penelitian yaitu pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan serta analisis uji statistik dan interpretasi.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang di tujukan kepada pemerintah berdasarkan dari penelitian ini.